



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 04, Bantul

Telp./fax : 0274-367348 Situs: <http://pn-bantul.go.id>

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

LAPORAN BULANAN

Agustus 2019



**Sub Bagian
Umum dan Keuangan**

**LAPORAN BULANAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I.B**

Agustus 2019

I. PENDAHULUAN

Laporan ini dibuat berdasarkan perkembangan yang terjadi pada masing masing bidang kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul dalam periode satu bulan. Selain diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan untuk menyampaikan laporan, laporan bulanan ini juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul. Dengan adanya laporan ini diharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentasikan perkembangan statistik pada Pengadilan Negeri Bantul secara ringkas sehingga Pengadilan Negeri Bantul sendiri dapat mengetahui fluktuasi hasil kerja pada setiap bulan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Untuk lebih jelasnya secara terperinci masing-masing bidang telah kami laporkan sendiri-sendiri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lembaga Peradilan.

Laporan ini menyajikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang administrasi umum yang meliputi pelaporan di Sub Bagian Umum dan Keuangan Bidang Kesekretariatan yang terdiri atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari sub bagian umum meliputi surat-menyurat, pemeliharaan dan pengelolaan barang persediaan, sarana prasarana dan alat kelengkapan operasional lainnya, keamanan serta pengelolaan perpustakaan. Juga terdiri atas pelaksanaan atas tugas pokok dan fungsi dari bidang keuangan meliputi kegiatan pelaksanaan anggaran, proses akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan dan anggaran sesuai Perma No. 7 Tahun 2016.

II. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari laporan ini meliputi pelaporan di Sub Bagian Umum dan Keuangan Bidang Kesekretariatan yang terdiri atas

- A. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari sub bagian umum meliputi:
 - 1) Tata Persuratan,
 - 2) Keamanan
 - 3) Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kelengkapan operasional lainnya
 - 4) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan persediaan, serta
 - 5) Pengelolaan perpustakaan.
- B. Pelaksanaan atas tugas pokok dan fungsi dari bidang keuangan meliputi:
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan anggaran,
 - 2) Proses akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban atas pengelolaan keuangan dan anggaran

III. LAPORAN

A. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari sub bagian umum meliputi:

1) Tata Persuratan

Mulai bulan Agustus ini administrasi persuratan baik surat masuk maupun surat keluar telah menggunakan aplikasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Semua surat telah dientri dan diupload di aplikasi tersebut. Setiap surat baik surat yang masuk maupun surat keluar sudah diagendakan dan diarsipkan dengan cukup baik, baik secara fisik (hardcopy) maupun secara elektronik (softcopy surat sudah bisa dilihat pada Aplikasi PTSP selama bulan Agustus ini. Semua surat baik surat masuk sudah terdokumentasi, terdistribusi dan terkirim dengan cukup baik

a.	Jumlah surat masuk bulan Agustus 2019	:	182	Surat
b.	Jumlah surat keluar bulan Agustus 2019	:	225	Surat
c.	Jumlah surat masuk s.d. bulan Agustus 2019	:	1.563	Surat
d.	Jumlah surat keluar s.d. bulan Agustus 2019	:	2.066	Surat

Gbr 1 : Tabel Jumlah surat Masuk-Keluar Bulan Agustus 2019

2) Keamanan

Pelaksanaan keamanan lingkungan kantor pada bulan Agustus 2019 ini bisa dikatakan berjalan cukup baik. Meskipun tenaga keamanan yang masih terbatas dan minim terutama terkait dengan rangkap tugas baik sebagai tenaga keamanan, pelayanan publik, pengamanan terkait proses persidangan maupun pengaturan parkir kendaraan, keluhan atas sikap petugas dalam melaksanakan tugas keamanan hampir tidak ada. Sampai dengan saat ini pengadilan Negeri Bantul belum memiliki gedung khusus petugas keamanan.

3) Pemeliharaan Sarana dan prasarana

Progres pencapaian kegiatan yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Bantul hingga akhir bulan Agustus diantaranya adalah :

A. Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor

- Perbaikan tata ruang untuk ruang kesehatan, laktasi dan ruang tunggu prioritas.
- Kegiatan perbaikan dan penataan kembali ruang pelayanan dengan memperlebar ruang tunggu pengunjung sidang serta ruang konfirmasi dan antri sidang proses pelaksanaannya sudah selesai dilaksanakan.
- Penataan area parkir pegawai yang ditempatkan dibagian tertentu dan tidak menyebar lagi, khususnya parkir kendaraan roda 2 difokuskan di halaman belakang kantor

4) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan persediaan

Selama bulan Agustus belum terjadi transaksi di Aplikasi SIMAK-BMN. Pengadaan belanja modal (aset) seperti alat pengolah data belum sepenuhnya bisa direalisasikan pada bulan Agustus ini. Adanya perubahan dalam Anggaran Belanja Modal Tambahan serta surat edaran yang mewajibkan pengadaan belanja modal melalui E-Procurement masih dalam proses negosiasi harga dan beberapa bagian sudah diikat dengan kontrak

Nilai aset BMN pada neraca Badan Urusan Administrasi per 30 Agustus adalah :

Akun Neraca	Nilai (Rp)
Persediaan	6.841.550
Tanah	4.089.224.000
Peralatan dan Mesin	2.261.190.209
Gedung dan Bangunan	5.065.365.550
Jalan dan Jembatan	29.150.000
Aset Tetap Lainnya	48.152.062
KDP	0
Software	74.570.000
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional	58.921.000
Akumulasi penyusutan	(5.619.195.249)
Jumlah	6.014.219.122

Gbr 2 : Tabel Nilai Aset pada Neraca DIPA 01 (BUA) Bulan Agustus 2019

Nilai aset BMN pada neraca Badan Peradilan Umum per 30 Agustus adalah

Akun Neraca	Nilai
Persediaan	1.449.400
Akumulasi penyusutan	(0)
Jumlah	1.449.400

Gbr 3 : Tabel Nilai Aset pada Neraca DIPA 03 (BADILUM) Bulan Agustus 2019

5) Pengelolaan perpustakaan

Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan pada bulan Agustus 2019 secara bertahap sudah cukup baik meskipun masih jauh dari harapan. Kegiatan pengelolaan perpustakaan pada sepanjang bulan Agustus terkait dengan kebersihan ruangan, penataan lemari serta fisik buku –buku perpustakaan. Buku-buku perpustakaan sekarang sepenuhnya sudah tertata rapi didalam lemari atau rak. Sudah tidak ada lagi buku-buku yang ditempatkan diatas lemari. Aplikasi perpustakaan sudah terinstal dan sudah dioperasikan meskipun terjadi kendala dalam proses katalogisasi dengan aplikasi tersebut yaitu minimnya sumber daya manusia atau tenaga yang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Secara bertahap kelengkapan perpustakaan akan dilanjutkan pada awal bulan berikutnya, terutama terkit dengan penataan lemari perpustakaan dan pembaruan label buku perpustakaan. Selain itu aakan dilakukan klasifikasi buku-buku yang msuk BMN atau tidak.

B. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari sub bagian keuangan meliputi:

1) Pengelolaan Keuangan dan Anggaran

➤ **DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)**

Anggaran DIPA dengan nomor DIPA-005.01.2.400172/2019 Pengadilan Negeri Bantul memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 6.823.775.000,-. Terdiri atas Belanja Pegawai (51) meliputi gaji dan tunjangan hakim dan pegawai sebesar Rp. 5.711.262.000 ,- Belanja Barang (52) meliputi belanja operasional perkantoran dan pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan peralatan kantor dan belanja barang

operasional lainnya sebesar Rp. 1.025.013.000,- dan Belanja Modal (53) terkait dengan pengadaan sarana perkantoran seperti alat pengolah data, sebesar Rp. 87.500.000,-. Dari dana tersebut digunakan untuk program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi (Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Penyerapan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi pada bulan Agustus 2019 ini sebesar 7,59% sehingga secara keseluruhan penyerapan sampai dengan bulan Agustus ini sebesar 65,62%. Penyerapan bulan Agustus 2019 tersebut merupakan akumulasi rata-rata dari semua kategori belanja terdiri atas penyerapan Belanja Pegawai sebesar 7,49%, Belanja Barang sebesar 8,83% dan belanja Modal sebesar 0%. Untuk penyerapan belanja pegawai pada bulan Agustus ini cukup baik mendekati dari rata-rata penyerapan bulanan yang berkisar 8%, secara keseluruhan dikarenakan penyerapan sampai dengan bulan Agustus merupakan realisasi terkait pembayaran gaji bulanan, yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaannya. Untuk belanja barang realisasi bisa dikatakan cukup baik, lebih dari rata-rata. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya tagihan dan pembayaran untuk bulan Agustus yang bersifat rutin. Pencatatan, pengakuan dan pelaporan realisasi secara akuntansi hanya berdasarkan tagihan pengantian UP yang sudah ditagihkan ke KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan telah terbit SP2D-nya yang hanya memuat realisasi pada bulan sebelumnya. Secara Riil masih banyak tagihan yang belum dimintakan UP-nya yang terkendala kelengkapan bukti transaksi maupun tagihan yang belum terbit SP2D-nya. Selain itu banyak belanja yang di Kontrakkan pada Pihak Ketiga/Rekanan yang belum jatuh tempo pembayaran. Untuk belanja modal sampai bulan ini belum ada realisasi dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan halaman III DIPA baru dimulai akhir bulan Agustus ini dan transaksi pemyaran baru akan dilakukan pada pertengahan bulan Agustus 2019. Hal lain dari rendahnya penyerapan belanja modal adalah perubahan kebijakan dalam proses pengadaan yang mengharuskan setiap pengadaan belanja modal menggunakan E-procurement (aplikasi berbasis elektronik dan online) yang sampai saat ini masih terkendala oleh sibuk dan padatnya jaringan serta kelengkapan berkas dan prasyarat lainnya.

berikut adalah informasi terkait penyerapan anggaran DIPA 01 yang terjadi pada bulan Agustus 2019:

a. Realisasi Belanja Kegiatan

Program	DIPA (Rp.)	Realisasi bln ini (Rp.)	Realisasi s/d bln ini (Rp.)	Prosentase
Layanan Dukungan Manajemen Satker	6.900.000	150.000	0	2,17%
Layanan Perkantoran	6.729.375.000	517.975.559	4.477.668.476	66,54%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	87.500.000	0	0	0%
Rata-rata prosentase realisasi anggaran				65,62%

Gbr 4 : Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA) Bulan Agustus 2019

Realisasi tersebut diatas sebenarnya belum termasuk belanja yang belum ditagihkan pembayaran. Masih terdapat realisasi belanja barang sekitar 3,68% yang belum diterbitkan SPM-nya karena terkendala Pengajuan UP yang belum sampai 50%.

b. Penerimaan Negara

1)	Porsekot Gaji	:	Rp.	0
2)	Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	:	Rp.	551.300
3)	Pengembalian Belanja	:	Rp.	0

Gbr 5 : Tabel Penerimaan Negara (PNBP) BUA Bulan Agustus 2019

➤ **DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)**

Anggaran DIPA dengan nomor DIPA-005.01.2.400173/2019 Pengadilan Negeri Bantul memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 127.440.000 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dari dana tersebut digunakan untuk program/kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri atas output Pos Bantuan Hukum; Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu; dan Program Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

Penyerapan anggaran DIPA Badan Peradilan Umum hingga bulan Agustus ini adalah sebesar 61,13%. Penyerapan yang cukup baik

a. Realisasi Belanja Program

Program	DIPA (Rp.)	Realisasi bln ini (Rp.)	Realisasi s/d bln ini (Rp.)	Prosentase
Pos Bantuan Hukum	31.200.000	3.600.000	8.000.000	25,64%
Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	96.240.000	20.088.530	69.904.480	72,64%
Rata-rata prosentase realisasi anggaran				61,13%

Gbr 6 : Tabel Nilai Aset pada Neraca DIPA 01 (BUA) Bulan Agustus 2019

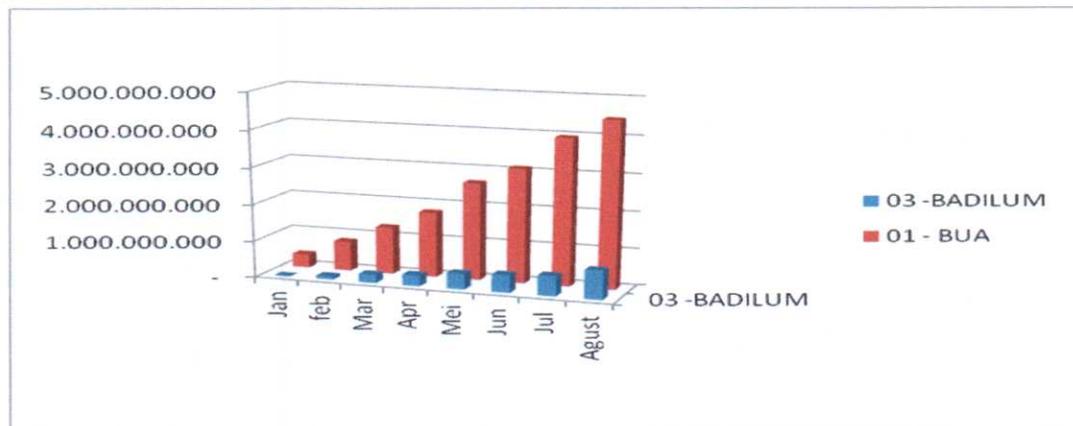
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penyerapan untuk DIPA 03 masih kurang dari target yang diharapkan. Hal ini terjadi disebabkan oleh tidak berjalannya beberapa kegiatan yang sudah ada dalam program kegiatan yang dibiayai oleh APBN dalam hal ini DIPA 03 (Badilum). Selain itu terjadi keterlambatan pengajuan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dikarenakan kurangnya dokumen kelengkapan dalam pengajuan dan pembebanan pada realisasi anggaran. Secara riil sebenarnya realisasi pada DIPA 03 berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disusun yaitu disekitar 70% penyerapan anggaran secara normal.

b. Penerimaan Negara

1)	Pendapatan Surat Pengesahan Dibawah Tangan	:	Rp.	0
2)	Pendapatan Uang Meja (Leges)	:	Rp.	108.000
3)	Pendapatan Ongkos Perkara	:	Rp.	590.000
4)	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	:	Rp.	1.120.900
Total Penerimaan Negara			Rp.	1.818.900

Gbr 7 : Tabel Penerimaan Negara (PNBP) Bulan Agustus 2019

**Grafik Penyerapan/Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03
Bulan Agustus 2019**



Gbr 8 : grafik realisasi/penyerapan anggaran Bulan Agustus 2019

- 2) Proses akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban atas pengelolaan keuangan dan anggaran.

Pelaksanaan kegiatan ini bersifat rutin dimana segala transaksi atau kegiatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran baik pengeluaran pada belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal. Segala kegiatan tersebut harus tercatat secara tertib, teratur dan sesuai kaidah-kaidah akuntansi, dalam hal ini akrual. Pencatatan dan pembukuan mulai dari proses awal pengadaan, pembebanan akun anggaran maupun proses pembayaran diperlukan kehati-hatian dan ketelitian. Kesalahan dalam proses ini mengakibatkan terkendalanya dalam pembebanan biaya dalam anggaran yang mengakibatkan anggaran untuk bulan selanjutnya tidak bisa direalisasikan. Proses akuntansi ini meliputi pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku kas Bank, penjurnalan serta posting dan lain-lainnya. Laporan pertanggung-jawaban (LPj) baik oleh Bendahara pengeluaran maupun Bendahara Penerimaan harus diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan terkait dan rekonsiliasi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- 3) Kegiatan perencanaan dan anggaran

Pada kegiatan perencanaan dan anggaran, telah dilakukan revisi pada bulan Agustus terutama terkait dengan revisi belanja pemeliharaan serta perubahan belanja modal, Revisi pada Dipa 01 maupun Dipa 03 Pengadilan Negeri Bantul juga telah memperoleh pengesahan DIPA untuk Tahun Anggaran 2019 baik untuk DIPA 01(BUA) maupun DIPA 03 (Badilum)

IV. KENDALA

1. Terbatasnya anggaran terkait dengan pengadaan sarana prasarana yang mengakibatkan kapitalisasi. Anggaran tersebut tidak bisa direvisi sehingga tidak semua sarana prasarana bisa direalisasikan dengan anggaran yang ada. Hal ini perlu dipahami bahwa setiap anggaran sudah ada mata anggarannya yang dibatasi untuk kegiatan tertentu saja sesuai dengan kategori dan klasifikasi anggaran. Tidak semua anggaran bisa direvisi dan dipergunakan untuk kegiatan lainnya, terutama terkait dengan kegiatan yang mengakibatkan kapitalisasi (penambahan aset).
2. Terbatasnya SDM yang ada terutama terkait dengan penerapan aturan dan kebijakan baru yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini aplikasi yang terkomputerisasi seperti RKA-K/L, GPP(aplikasi gaji), Sistem Aplikasi Satker, SPM, Silabi, Konfirmasi, Alikasi SIMAN (sistem informasi manajemen aset negara), Persediaan, Tata Persuratan dan Katalogisasi Perpustakaan, dan lain sebagainya. Belum juga termasuk Aplikasi lain yang terkait dengan tingkat pusat dan antar lembaga/instansi seperti Komdanas, E-monev, E-rekon, Smart dan lain sebagainya.
3. Terbatasnya SDM terutama pekerjaan terkait kebersihan kantor, keamanan dan perawatan maupun pemeliharaan serta penataan fasilitas dan inventaris kantor seperti pemindahan rak arsip, meubelair dan sebagainya. Belum lagi setiap petugas terkait kebersihan maupun keamanan dibebani tugas lain yang waktunya berbarengan seperti Satgas Sidang, pelayanan pengunjung, informasi maupun pengaturan parkir.
4. Minimnya koordinasi dengan bagian-bagian lainnya, sehingga apa yang dikerjakan seringkali kurang sesuai dengan perencanaan.
5. Masih terjadi tumpang tindih TUPOKSI baik dalam Sub Bagian Umum dan Keuangan maupun dengan bagian-bagian atau ruangan lainnya.
6. Masih banyak yang rangkap tugas pokok dan fungsi yang mempengaruhi "ceck and balance" kesaling-terujian. Hal ini terjadi bukan hanya dikarenakan terbatasnya tenaga tetapi karena keterbatasan sumber daya
7. Rotasi atau rolling masih belum berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang diperlukan di setiap ruangan. Terutama terkait dengan penempatan dan penugasan ke ruangan yang lain, yang mana terbatasnya personil menyebabkan tugas dan tanggung jawab pegawai yang di roling terbengkalai.

V. KESIMPULAN

1. Pada umumnya semua pelaksanaan kegiatan ada Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan meskipun secara pelan dan bertahap, namun masih perlu peningkatan performa pada masing masing bidang, tidak terkecuali di Sub Bagian Umum dan Keuangan.
2. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan terutama terkait dengan pejabat perbendaharaan dan pengelola anggaran karena tidak semua kewenangan dan tugas terkait anggaran ada pada sub bagian keuangan saja. Perlu komunikasi dan koordinasi yang intens agar semua kegiatan berjalan selaras dan terlaksana dengan baik.
3. Dengan volume pekerjaan yang cukup banyak, diperlukan Sumber daya yang memadai terutam terkait dengan penerapan kebijakan dan penggunaan aplikasi berbasis teknologi Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan personil tenaga untuk ditempatkan di bidang administrasi sub bagian umum dan keuangan

khususnya maupun administrasi di sekretariat maupun di kepaniteraan pada umumnya

VI. USUL DAN SARAN

- ✓ Perlunya pertimbangan rotasi/ roling yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas yang diperlukan tidak hanya untuk peningkatan kapasitas keahlian tetapi juga dalam rangka pengkaderan SDM yang mumpuni dan berpengalaman disetiap bidang pekerjaan.
- ✓ Perlunya koordinasi dan komunikasi yang intens baik secara personal di tiap ruang maupun antar ruang.
- ✓ Perlunya penyesuaian tugas yang lebih baik lagi sehingga tidak tumpang tindih baik tugas pokok maupun tugas lainnya
- ✓ Kepatuhan atas rencana program kegiatan perlu ditingkatkan lagi, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan terjadwal dengan baik dan tidak tumpang tindih
- ✓ Untuk mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia perlu dilakukan pembinaan baik secara internal maupun dorongan dari pengawas.

Mengetahui;
Hakim Pengawas Bidang



Koko Riyanto, S.H., M.H.
NIP. 19801227 200312 1 001

Bantul, 5 September 2019
Ka Subbag Umum dan Keuangan



Johan Wahyudi, S.E.
NIP. 19770422 200912 1 001

Lampiran 1

*Dokumen Laporan dan Pelaksanaan Kegiatan
Subbag. Umum dan Keuangan*

LAPORAN CAPAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TA 2019
BULAN AGUSTUS 2019

Kementerian/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Program : (01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
 Satuan Kerja : (400172) Pengadilan Negeri Bantul
 Propinsi : (04) D.I. Yogyakarta
 Lokasi : (04.01) Bantul

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME OUTPUT	ALOKASI/PAGU (Rp)	REALISASI S.D. BULAN LALU (Rp.)	REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D. BULAN INI			SISA ANGGARAN		KETERANGAN
					(Rp.)	%	OUTPUT	(Rp.)	%	OUTPUT	(Rp.)	%	
1066	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI		6.736.275.000	1.288.144.195	518.125.559	7,69		4.477.818.476	66,47		2.258.456.524	33,53	
1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker[Base Line]	1 Lyn	6.900.000	-	150.000	2,17	1 Lyn	150.000	2,17	8 Lyn	6.750.000	97,83	
53	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		6.900.000	-	150.000	2,17		150.000	2,17		6.750.000	97,83	
A	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/DJPB/KPKNL		6.900.000	-	150.000	2,17		150.000	2,17		6.750.000	97,83	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa		6.900.000	-	150.000	2,17		150.000	2,17		6.750.000	97,83	
	- Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL		6.900.000	-	150.000	2,17		150.000	2,17		6.750.000	97,83	
1066,994	Layanan Perkantoran	1 Lyn	6.729.375.000	3.959.692.917	517.975.559	7,70	1 Lyn	4.477.668.476	66,54	8 Lyn	2.251.706.524	33,46	
001	Gaji dan Tunjangan		5.711.262.000	3.460.377.500	427.620.121	7,49		3.887.997.621	68,08		1.823.264.379	31,92	
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN		5.711.262.000	3.460.377.500	427.620.121	7,49		3.887.997.621	68,08		1.823.264.379	31,92	
511111	- Belanja Gaji Pokok PNS		2.388.235.000	1.677.113.340	190.252.440	7,97		1.867.365.780	78,19		520.869.220	21,81	
511119	- Belanja Pembulatan Gaji PNS		34.000	26.161	2.642	7,77		28.803	84,71		5.197	15,29	
511121	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		161.385.000	115.965.552	13.368.422	8,28		129.333.974	80,14		32.051.026	19,86	
511122	- Belanja Tunj. Anak PNS		45.583.000	30.032.360	3.447.056	7,56		33.479.416	73,45		12.103.584	26,55	
511123	- Belanja Tunj. Struktural PNS		33.800.000	23.400.000	2.600.000	7,69		26.000.000	76,92		7.800.000	23,08	
511124	- Belanja Tunj. Fungsional PNS		2.041.715.000	1.173.935.000	147.395.000	7,22		1.321.330.000	64,72		720.385.000	35,28	
511125	- Belanja Tunj. PPH PNS		329.370.000	134.785.947	14.349.341	4,36		149.135.288	45,28		180.234.712	54,72	
511126	- Belanja Tunj. Beras PNS		138.606.000	70.030.140	10.211.220	7,37		80.241.360	57,89		58.364.640	42,11	
511129	- Belanja Uang Makan PNS		541.464.000	212.259.000	43.234.000	7,98		255.493.000	47,19		285.971.000	52,81	
511151	- Belanja Tunjangan Umum PNS		31.070.000	22.830.000	2.760.000	8,88		25.590.000	82,36		5.480.000	17,64	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.018.113.000	499.315.417	90.355.438	8,87		589.670.855	57,92		428.442.145	42,08	
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		298.794.000	170.245.333	33.133.700	11,09		203.379.033	68,07		95.414.967	31,93	
521111	- Belanja Keperluan Perkantoran		216.937.000	126.988.383	15.795.100	7,28		142.783.483	65,82		74.153.517	34,18	
521119	- Belanja Barang Operasional Lainnya		20.000.000	6.006.500	8.864.500	44,32		14.871.000	74,36		5.129.000	25,65	
521811	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		61.857.000	37.250.450	8.474.100	13,70		45.724.550	73,92		16.132.450	26,08	
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA		274.840.000	98.809.541	25.438.465	9,26		124.248.006	45,21		150.591.994	54,79	
521111	- Belanja Keperluan Perkantoran		107.800.000	27.287.799	14.058.000	13,04		41.345.799	38,35		66.454.201	61,65	
521114	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		24.000.000	4.226.500	1.344.000	5,60		5.570.500	23,21		18.429.500	76,79	
522111	- Beban Langganan Listrik		123.240.000	65.309.026	8.400.543	6,82		73.709.569	59,81		49.530.431	40,19	
522112	- Beban Langganan Telepon		12.000.000	1.159.716	196.022	1,63		1.355.738	11,30		10.644.262	88,70	
522113	- Beban Langganan Air		7.800.000	826.500	1.439.900	18,46		2.266.400	29,06		5.533.600	70,94	

LAPORAN CAPAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TA 2019
BULAN AGUSTUS 2019

C	PEMELIHARAAN KANTOR		330.793.000	162.663.243	26.733.273	8,08		189.396.516	57,26		141.396.484	42,74
523111	- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		168.900.000	72.532.800	17.760.500	10,52		90.293.300	53,46		78.606.700	46,54
523119	- Beban Pemeliharaan Gedung&Bangunan lainnya		24.360.000	1.399.500	-	0,00		1.399.500	5,75		22.960.500	94,25
523121	- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		137.533.000	88.730.943	8.972.773	6,52		97.703.716	71,04		39.829.284	28,96
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR		86.850.000	58.382.000	4.600.000	5,30		62.982.000	72,52		23.868.000	27,48
521115	- Honor Operasional Satuan Kerja		55.200.000	27.600.000	4.600.000	8,33		32.200.000	58,33		23.000.000	41,67
521119	- Belanja Barang Operasional Lainnya		31.650.000	30.782.000	-	0,00		30.782.000	97,26		868.000	2,74
E	KOORDINASI/KONSULTASI/SOSIALISASI		26.836.000	9.215.300	450.000	1,68		9.665.300	36,02		17.170.700	63,98
524111	- Beban Perjalanan Dinas Biasa		22.036.000	4.565.300	450.000	2,04		5.015.300	22,76		17.020.700	77,24
524113	- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		4.800.000	4.650.000	-	0,00		4.650.000	96,88		150.000	3,13

Bantul, 2 September 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 WIRATNO, S.H.
 NIP. 19720213 199303 1 002

LAPORAN CAPAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TA 2019
BULAN AGUSTUS 2019

Kementerian/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Program : (02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
 Satuan Kerja : (400172) Pengadilan Negeri Bantul
 Propinsi : (04) D.I. Yogyakarta
 Lokasi : (04.01) Bantul

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	ALOKASI/PAGU	REALISASI S.D. BULAN LALU (Rp.)	REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D. BULAN INI			SISA ANGGARAN		KETERANGAN
					(Rp.)	%	OUTPUT	(Rp.)	%	OUTPUT	(Rp.)	%	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		87.500.000	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000	-	
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Overhead)	1 lyn	87.500.000	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000	-	
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3 Unit	87.500.000	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000	-	
A	Alat Pengolah Data Pendukung SIPP	7 Unit	87.500.000	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000	-	
532111	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin		87.500.000	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000	-	
JUMLAH PAGU BELANJA MODAL [53]			87.500.000	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000	-	-

Realisasi Anggaran - Klasifikasi Anggaran

KODE AKUN	KLASIFIKASI BELANJA	SATUAN VOLUME	ALOKASI/PAGU	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TA 2018						SISA ANGGARAN		KETERANGAN	
				S.D. BULAN LALU	BULAN INI	%	OUTPUT	S.D BULAN INI	%	OUTPUT	Rp.		%
51	Belanja Pegawai	1 lyn	5.711.262.000	3.460.377.500	427.620.121	7,49	1 lyn	3.887.997.621	68,08	8 lyn	1.823.264.379	31,92	
52	Belanja Barang	1 lyn	1.025.013.000	499.315.417	90.505.438	8,83	1 lyn	589.820.855	57,54	8 lyn	435.192.145	42,46	
53	Belanja Modal	1 Lyn	87.500.000	-	-	0,00			0,00		87.500.000	100,00	
Jumlah Keseluruhan			6.823.775.000	3.959.692.917	518.125.559	7,59	1 Lyn	4.477.818.476	65,62	8 lyn	2.345.956.524	34,38	

Bantul, 2 September 2019
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WIRATNO, S.H.
 NIP. 19720213 190303 1 002

**LAPORAN CAPAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TA 2019
BULAN AGUSTUS 2019**

Kementerian/Lembaga
Unit Organisasi
Program
Satuan Kerja
Propinsi
Lokasi

: (005) Mahkamah Agung RI
: (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
: (07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
: (400173) Pengadilan Negeri Bantul
: (04) D.I. Yogyakarta
: (04.01) Bantul

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME	ALOKASI/PAGU (Rp)	REALISASI S.D. BULAN LALU (Rp.)	REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D. BULAN INI			SISA ANGGARAN		KETERANGAN
					(Rp.)	%	OUTPUT	(Rp.)	%	OUTPUT	(Rp.)	%	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		127.440.000	54.215.950	23.688.530	18,59		77.904.480	61,13		49.535.520	38,87	
1049.003	Pos Bantuan Hukum[Base Line]	312 Jam	31.200.000	4.400.000	3.600.000	11,54		8.000.000	25,64		23.200.000	74,36	
051	Pos Bantuan Hukum		31.200.000	4.400.000	3.600.000	11,54		8.000.000	25,64		23.200.000	74,36	
522131	Belanja Jasa Konsultan		31.200.000	4.400.000	3.600.000	11,54		8.000.000	25,64		23.200.000	74,36	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	240 Perkara	96.240.000	49.815.950	20.088.530	20,87		69.904.480	72,64		26.335.520	27,36	
1049.005.UD	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Yogyakarta		96.240.000	49.815.950	20.088.530	20,87		69.904.480	72,64		26.335.520	27,36	
051	Pendaftaran berkas perkara		28.800.000	16.328.150	7.353.700	25,53		23.681.850	82,23		5.118.150	17,77	
521211	Belanja Bahan		4.800.000	1.113.650	-	0,00		1.113.650	23,20		3.686.350	76,80	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		24.000.000	15.214.500	7.353.700	30,64		22.568.200	94,03		1.431.800	5,97	
052	Penetapan Hari Sidang		2.150.000	450.000	600.000	27,91		1.050.000	48,84		1.100.000	51,16	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		2.150.000	450.000	600.000	27,91		1.050.000	48,84		1.100.000	51,16	
053	Pemeriksaan Disidang Pengadilan		39.300.000	27.260.000	10.690.000	27,20		37.950.000	96,56		1.350.000	3,44	
521211	Belanja Bahan		37.800.000	27.260.000	9.940.000	26,30		37.200.000	98,41		600.000	1,59	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.500.000	0	750.000	50,00		750.000	50,00		750.000	50,00	
054	Minutasi/Upaya Hukum		7.200.000	791.300	873.830	12,14		1.665.130	23,13		5.534.870	76,87	
521211	Belanja Bahan		7.200.000	791.300	873.830	12,14		1.665.130	23,13		5.534.870	76,87	
055	Pengiriman Petikan/salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa		10.000.000	1.700.000	250.000	2,50		1.950.000	19,50		8.050.000	80,50	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10.000.000	1.700.000	250.000	2,50		1.950.000	19,50		8.050.000	80,50	
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan		2.000.000	1.400.000	0	0,00		1.400.000	70,00		600.000	30,00	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2.000.000	1.400.000	-	0,00		1.400.000	70,00		600.000	30,00	
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama		4.890.000	1.746.500	20.000	0,41		1.766.500	36,12		3.123.500	63,88	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		1.250.000	766.500	20.000	1,60		786.500	62,92		463.500	37,08	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.640.000	980.000	-	0,00		980.000	26,92		2.660.000	73,08	
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama		1.900.000	140.000	301.000	15,84		441.000	23,21		1.459.000	76,79	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		500.000	140.000	301.000	60,20		441.000	88,20		59.000	11,80	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.400.000	0	-	0,00		0	0,00		1.400.000	100,00	
52	Belanja Barang Keseluruhan		127.440.000	54.215.950	23.688.530	18,59	-	77.904.480	61,13	-	49.535.520	38,87	



Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Agustus 2019	Tahun Anggaran 2019
---------------------------------	--	--------------------------------

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kab/Kota : (01) KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
Alamat dan Telp. : Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.4, Bantul
No Krws & Kewenangan: (0001.KD) Kantor Daerah
Dokumen : (01) DIPA
Nomor Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019
Tanggal Dokumen : 05-12-2018
Tahun Anggaran : 2019
KPPN : (030) YOGYAKARTA

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 29.090.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor:000582

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	27.267.000	336.700.632	334.877.632	29.090.000
	1. BP Kas (tunai dan bank)	27.267.000	336.700.632	334.877.632	29.090.000
	2. BP Uang Muka/Voucher	0	0	0	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	27.267.000	281.979.350	280.156.350	29.090.000
	1. BP UP *)	27.267.000	75.205.438	73.382.438	29.090.000
	2. BP LS-Bendahara	0	0	0	0
	3. BP Pajak	0	2.339.252	2.339.252	0
	4. BP Lain-lain	0	204.434.660	204.434.660	0

*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 910.000

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	8.605.900
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	20.484.173 (+)
3. Jumlah kas	Rp.	29.090.073

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	29.090.000
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	29.090.073 (+)
3. Selisih Kas	Rp.	-73

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP	Rp.	29.090.000
2. Kuitansi UP	Rp.	910.000 (+)
3. Jumlah UP	Rp.	30.000.000
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	30.000.000 (+)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

1. Sekisih kas kecil sebesar (Rp 73,-)
2. -- Tidak Ada --



KAB. BANTUL, 30-08-2019

Bendahara Pengeluaran,

SITI SOLIKHAH, S.H.

NIP. 198608152009122002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Senin Tiga Puluh September Dua Ribu Sembilan Belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 29.090.000 dan nomor bukti terakhir: 000582

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	29.090.000	
2. Saldo BP BPP	Rp.	0	
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	0	
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp.	29.090.000	

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP	Rp.	29.090.000	
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0	
4. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0	
5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	Rp.	29.090.000	

C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5) Rp. 0

II Hasil Pemeriksaan Kas:

A. Kas yang dikuasai Bendahara:

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	8.605.900	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	20.484.173	
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)	Rp.	29.090.073	

B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3) Rp. -73

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	29.090.000	
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	910.000	
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)	Rp.	30.000.000	

B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. 30.000.000

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B) Rp. 0

IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Sekisih kas kecil sebesar (Rp 73,-)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran


SITI SOLIKHAH, S.H.
NIP. 198608152009122002



30-09-2019

Yang memeriksa
KPA atau PPK atas nama KPA

WIRATNO, S.H.
NIP. 197202131993031002

*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 400172
BULAN : AGUSTUS 2019

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek. **	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	023601000627302	BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bantul	20	S-1001/WPB.15/KP.01/2015	17-02-2015	20.484.173,00

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,

 SITI SOLIKHAH, S.H.
 NIP. 198608152009122002

DOKUMENTASI KEGIATAN
SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Perbaikan dan Penataan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
RuangTunggu Pengunjung Sidang



Perbaikan dan Penataan Ruang Tunggu Pengunjung Sidang

DOKUMENTASI KEGIATAN
SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Penataan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Loket Laport dan Antrian Sidang Sidang



Loket Laport dan Antrian Sidang Sidang

DOKUMENTASI KEGIATAN
SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Penataan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Ruang Kesehatan, Ruang Laktasi dan Ruang Tunggu Prioritas



Ruang Kesehatan, Ruang Laktasi dan Ruang Tunggu Prioritas

DOKUMENTASI KEGIATAN
SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Penataan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Pembatasan Akses Interaksi Tamu Perkara



Pembatasan Akses Interaksi Tamu Perkara

Lampiran 2
*Dokumen Rapat Koordinasi
Penyusunan Laporan Bulanan
Subbag. Umum dan Keuangan*



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Nomor : W13-U5/~~2019~~ /OT.01.2/IX/2019
Hal : Undangan Rapat

Bantul, 3 September 2019

Kepada Yth.

1. Hakim Pengawas Bidang Subbag. Umum dan Keuangan
2. Para Staf Subbag. Umum dan Keuangan
di_Tempat

Bersama ini dengan hormat kami mohon kehadiran Bapak/Ibuk pada Rapat Rutin Bulanan Subbag. Umum dan Keuangan Sekretariat Pengadilan Negeri Bantul, yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 5 September 2019
Jam : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Subbag. Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul
Acara : Koordinasi penyusunan laporan bulanan

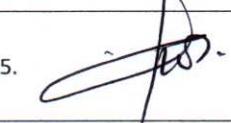
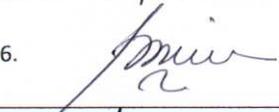
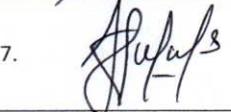
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terims kasih.

Ka Subbag. Umum dan Keuangan

JOHAN WAHYUDI, S.E.
NIP.19770422 200912 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Ruang Subbag. Umum dan Keuangan, Kamis, 5 September 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Johan Wahyudi	Kasubag Umum & Keu	1. 
2.	Koko Riyanto, SH. MH.	Hakim Pengawas Badan	2. 
3.	Siti Solikhah.	Staf Umum & Keu	3. 
4.	Siswati Mariana Sihombing	Staf Umum & Keu	4. 
5.	M. Jazuri	Staf Umum & Keu	5. 
6.	Epi Sulandis	Staf Umum & Keu	6. 
7.	T.D. Nanda Deby. R	Staf Umum dan Keuangan	7. 

Pimpinan Rapat,



JOHAN WAHYUDI, S.E.
 NIP.19770422 200912 1 001

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Nomor

Revisi

FORM NOTULEN

Tanggal

5 September 2019**RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN
BULANAN SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN**

Halaman

1 of 2

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 5 September 2019		KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Subbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul		<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
PESERTA RAPAT	Hakim Pengawas Bidang, Kasubbag. dan Staf Umum dan Keuangan, ,		<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
MULAI WAKTU RAPAT	08.30	SELESAI	09.45	
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Koordinasi data laporan setiap staf		Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>
	2	Evaluasi pelaksanaan kegiatan		
	3	Analisa kendala dan hambatan		
	4	Pengumpulan data dan penyusunan laporan		
JUMLAH PESERTA RAPAT	6	Orang		
PIMPINAN RAPAT	1	Johan Wahyudi, S.E		
MODERATOR	2	Siswati Mariana S., A.Md.		
NOTULEN	3	Siti Solikhah, SH.		

BAHASAN MATERI RAPAT**CATATAN**

1. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan tugas dan fungsi subbag. Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul dalam satu bulan
 - a. Beberapa temuan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing terkait dengan pengawasan kebersihan lingkungan kantor yang kurang optimal terutama ruang pelayanan publik seperti kebersihan di ruang sidang, PTSP, kamar mandi/toilet serta halaman
 - b. Dokumen tagihan yang tidak lengkap dan sesuai dengan akun yang diajukan
 - c. Penyerapan DIPA 03 yang kurang optimal
 - d. Program yang tidak berjalan dikarenakan pengalihan kegiatan

KESIMPULAN

- Pengawasan pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan perlu ditingkatkan lagi
- Pengembalian dan revisi dokumen tagihan yang sesuai dan lengkap
- Perlu koordinasi dengan bagian lain khususnya bagian teknis yang terkait langsung dengan kegiatan yang ditanggung oleh DIPA 03, terkait dengan kegiatan yang kurang berjalan sebagaimana seharusnya
- Perlunya sosialisasi terkait dengan mutasi internal/rooling staf subbag. Umum dan keuangan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Nomor

Revisi

FORM NOTULEN

Tanggal **5 September 2019**

**RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN
BULANAN SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN**

Halaman **2 of 2**

2. Kendala-Kendala yang dihadapi :

- a. Rooling/perpindahan internal dari staf Subbag. Umum dan keuangan ke bagian lain tidak pernah disosialisasikan
- b. Terbatasnya personil yang masih jauh dari jumlah yang seharusnya
- c. Rendahnya koordinasi terkait dengan penyerapan DIPA 03 yang hampir sepenuhnya untuk kegiatan teknis

- Setiap kebijakan terkait mutasi internal perlu dikomunikasikan dan perlu disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan keahlian.
- Koordinasi yang lebih intens lagi
- Teguran dan peringatan dalam upaya meningkatkan kinerja

3. Peyesuaian dan penambahan tugas baru :

- Perubahan, Penyesuaian dan penambahan Tugas dan fungsi baru terutama terkait mutasi internal staf yang ditempatkan di bagian lain.

- Telah dibuatkan tupoksi baru dengan melakukan penambahan tugas untuk staf Subbag. Umum dan Keuangan terutama karena kekosongan personil

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Agar setiap kegiatan dari subbag. Umum dan keuangan tetap berjalan meskipun terkendala terbatasnya staf terkait dengan pengoperasian aplikasi umum dan keuangan
- Setiap tupoksi tetap dilaksanakan secara optimal

2. Tujuan

- Masing-masing staf terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya
- Meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kualitas dari output tugas dan fungsi subbagian umum dan keuangan

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULEN

DIPERIKSA

DIPERIKSA DAN DISAHKAN

Staf Subbag Umum dan Keuangan Ka Subbag Umum dan Keuangan

Hakim Pengawas Bidang

SITI SOLIKHAH, S.H.
NIP. 19860815 200912 2 002

JOHAN WAHYUDI, S.E.
NIP.19770422 200912

KOKO RIYANTO, S.H., M.H.
NIP.19801227 200312 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI DAN MONEV PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN
SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

R. Subbag. Umum dan Keuangan PN Bantul
Kamis, 5 September 2019

